

- Pimpinan : Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berhadir diruangan ini, shalawat serta salam tak hentinya kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah.
Yang kami hormati Pimpinan serta Anggota Badan Legislasi DPRK Aceh Barat Daya, yang kami hormati Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat Daya serta seluruh peserta rapat yang sudah berhadir pada hari ini.
Kita lanjut pembahasan yang kemarin sempat tertunda.
- Dinas Perhubungan : Ass
Tentang restribusi Bus Sekolah Rp. 200.000 per hari diluar Kabupaten dalam Provinsi Aceh sedangkan dalam Kabupaten Rp. 100.000 per hari. Ada Bus Sekolah sebanyak 13 unit, kemarin memang ada yang terlewatkan sehingga baru sekarang dimasukkan.
- Tanzilurrahman : Cara kita tahu terkait dengan per hari 100.000 dalam daerah, cara kita mengetahuinya bagaimana.
- Dinas Perhubungan : Dalam Kabupaten 100.000 per hari, jika di pakai dua hari jadi 200.000, dan disitu juga ada minyak dan untuk sopir. Kalau luar Provinsi 250.000 per hari. Kalau untuk pengawasannya kita melalui permohonan dari yang meminta.
Target restribusi Dinas Perhubungan 120.000.000 yang terealisasi hanya sebesar 70%.
- Pimpinan : Kami sepakat kalau memang target tercapai bisa kita berikan penghargaan. Jadi untuk mengawasi itu bagaimana sehingga lebih terkontrol PAD kita.
- Dinas Perhubungan : Kita sekarang yang masih bagus busnya sebanyak 11, sedangkan 1 bus masih di bengkel.
- Pimpinan : Untuk memudahkan pengawasan, setiap yang menyewa harus ada suratnya sehingga lebih tertib, jangan hanya memakai lisan saja. Kalau bisa nanti kita bisa menambah mobil bus baru dan itu menjadi catatan kita pada saat pansus nanti.

- Justar. YS, S.Pd : Seandainya yang beberapa poin itu terealisasi berapa target untuk tahun depan.
- Dinas Perhubungan : Tahun ini target 152 juta, yang masuk PAD 60 juta sekian.
- Justar. YS, S.Pd : Yang kami maksud adalah untuk tahun depan jika semua poin yang tertera itu tercapai, apakah bisa mencapai target sampai 400 juta. Karena kita sangat membutuhkan PAD untuk pembangunan daerah kita.
- Tanzilurrahman : Target yang realisasi tadi 60 juta sekian apakah masuk juga untuk pemeliharaan juga.
- Khairunnas : Ass
Mengenai 50.000 untuk satu bus dari kutipan anak sekolah, memang sudah ada Qanunnya. Kalau bisa kita gratiskan lebih bagus sedangkan Pemda sudah memfasilitasi. Apakah memang sudah elok kita kutip 50.000 tersebut dan jangan sampai ada manipulasi.
- Kabag Hukum : Kutipan dari anak sekolah itu sebesar 2000 rupiah itu memang boleh di kutip dan ada regulasinya.
- Khairunnas : Kita sudah menganggarkan untuk Bus sekolah tersebut seperti minyak mobil dan pemeliharaannya. Kalau memang ada dasar hukumnya tidak masalah. Karena uang 50.000 itu hasil dari pungutan.
- Dinas Perhubungan : Pendapatan yang diberikan sebesar 50.000 itu untuk PAD dan memang ada dasar hukumnya.
- Pimpinan : Kami lihat mobil itu tidak terlalu besar dan itu yang selalu digunakan untuk perawatan mendadak, disamping memang untuk PAD. Intinya bagaimana uang 50.000 maksimal dalam pengelolaannya.
- Kabag Hukum : Terkait dengan retribusi toko bertingkat dan tidak bertingkat juga gudang transito, ini sudah pernah di qanunkan. Apakah perlu kita perbarui atau tidak.
- Keuangan : Izin Transito ada di DPMPTSP dan terkait realisasi surplus.

- Kabah Hukum : Terkait dengan sewa toko bertingkat dan tidak bertingkat itu sudah di Qanunkan tahun lalu dan untuk sewa sawah itu belum masuk dalam Qanun.
- Keuangan : Kami sudah menyampaikan ke SKPK untuk mengusulkan apa saja potensi redistribusi pajak baru.
- Pimpinan : Harapan kepada Kabag Hukum untuk memanggil SKPK untuk melihat kembali potensi-potensi PAD kita.
- Tanzilurrahman : Harapan kami kedepan kalau bisa dibuat satu pintu saja, jangan seperti sekarang di Perhubungan satu, di tempat lain juga ada sehingga kami dalam pengawasan kewalahan.
- Khairunnas : Kalau bisa mengenai tanah, tolong telusuri berapa aset tanah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Pimpinan : Soal tanah ini kita selesaikan dulu sehingga kita tidak berulang-ulang, karena kalau ini tidak selesai nanti akan muncul lagi. Kemudian mengenai beko loder mohon koordinasi lagi dengan PU berapa jumlah beko loder kita yang masih berfungsi.
- Rahmat Irfan : Kami mengusulkan untuk memanggil Kadis yang ada aset, baik bergerak maupun non bergerak. Juga terkait dengan toko juga harus dibuat ring-ringnya karena toko Blangpidie beda dengan toko yang ada di Manggeng atau daerah lain.
- Kabag Hukum : Untuk sawah beberapa tahun belakang ini dikelola oleh Kabag Umum Setdakab. Untuk itu mohon penjelasan dari Kabag Umum.
- Pimpinan : Kita ada aset baik sawah, tanah atau toko untuk itu kita bisa sepakati berapa aset pemda yang bisa menghasilkan PAD.
- Keuangan : Untuk sewa sawah kalau bisa kita putuskan hari ini, berapa yang kita sepakati.
- Pimpinan : Mohon men inventarisir berapa aset tidak bergerak yang ada di Setdakab.
- Khairunas : Kita ambil kesimpulan per panen 7.000.000 per sekali panen.

- Pimpinan : Kita sepakati sewa sawah per hektar per sekali panen sebesar Rp. 7.000.000,- kita lanjut mengenai sewa toko.
- Justar. YS, S.Pd : Untuk Perhubungan mohon dimasukkan juga biaya bongkar muat, karena kami lihat belum ada dalam Rancangan Qanun ini. Jadi dibuat regulasinya apakah per truk sebesar 30.000 atau bagaimana. Tahun lalu besaran kutipannya sebesar 20.000, jadi apakah masih sama seperti tahun lalu atau kita rubah. Juga kami mengusulkan untuk pengangkutan gabah yang diangkut keluar juga tidak ada kutipan restribusinya, kami mengharapkan supaya dimasukkan.
- Kabag Hukum : Terkait toko itu tidak ada klasifikasi tempat, kalau memang itu ruko pemerintah dimanapun tempatnya sama pungutan sewanya. Tapi kalau memang kita membuat tipe bisa kita buat, misal wilayah Kecamatan Manggeng sampai Suak masuk ke Tipe A dan seterusnya.
- Untuk Toko bertingkat
 - Type A (Blangpidie) Rp. 15.000.000
 - Type B (Luar Blangpidie) Rp. 9.000.000
 - Untuk toko tidak bertingkat
 - Type A (Blangpidie) Rp. 7.000.000
- Plh. Sekwan : Bisa tidak kita membuat Qanun Pendapatan Daerah, sehingga apa yang sudah kita buat tidak bertabrak. Maksud kami kita kumpulkan seluruh Qanun restribusi daerah setelah itu kita buat satu qanun yang menghimpun semuanya. Artinya jangan tumpang tindih Qanun yang sudah ada sehingga tidak bisa kita lakukan pungutan.
- Kabag Hukum : Inilah Omnibuslawnya sehingga tidak ada lagi yang bisa melakukan pungutan selain dengan Qanun ini.
- Pimpinan : Intinya pembahasan Qanun ini kita selesaikan betul-betul dan sempurna karena setelah ini kita juga akan membahas Rancangan Qanun RPJM.
- Tanzilurrahman : Menurut kami kalau memang nanti memanggil SKPK terkait mohon dilibatkan DPRK.

Pimpinan : Kalau memang dibutuhkan kami akan sampaikan ke Sekda supaya dapat menghubungi Kadis-kadisnya untuk menyelesaikan terkait dengan redistribusi ini.

Jadi rapat kita pada hari ini kita skor dulu nanti akan kami hubungi Setda untuk pembahasan selanjutnya.

Rapat pada hari ini kita skor. Terima kasih kepada seluruh peserta rapat, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memimpin rapat dan kami akhiri assalamu'alaikum wr. Wb.